

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Perusahaan

PT BGR Logistik Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, menyediakan solusi jasa logistik berbasis digital dengan jaringan yang luas dan layanan yang terintegrasi, kompetitif, handal, serta dapat dipercaya. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero). Dalam komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman logistik yang unggul melalui pemanfaatan teknologi digital, PT BGR Logistik Indonesia menawarkan berbagai layanan seperti pergudangan, jasa logistik, dan penyediaan manajemen rantai pasok (*supply chain management provider*). Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi, perusahaan ini juga telah mengimplementasikan sistem *Enterprise Resource Planning (ERP)* SAP S/4 HANA guna mendukung peningkatan mutu layanan kepada para pelanggan.



Gambar 4.1 Logo PT BGR Logistik Indonesia

Sumber: <https://www.bgrlogistik.id/id> (Diakses 28 November 2024)

Perusahaan menjunjung tinggi nilai utama yang dirangkum dalam akronim AKHLAK. Tata nilai operasional perusahaan yaitu:

- a) Integritas (*Integrity*): yakni memegang teguh kejujuran dalam berpikir, berbicara,

dan bertindak.

- b) Pelayanan Prima (*Service Excellence*): yaitu memberikan layanan yang melampaui standar dan ekspektasi pelanggan secara konsisten.
- c) Profesional (*Professional*): yang mencakup penguasaan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan diri maupun orang lain.
- d) Keselamatan (*Safety*): dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan demi menjamin keselamatan kerja.
- e) Inovasi (*Innovation*): yaitu mengoptimalkan seluruh sumber daya secara kreatif untuk menciptakan perbaikan dan perubahan berkelanjutan, guna meningkatkan nilai perusahaan serta kepuasan pemangku kepentingan.

4.1.2 Sejarah Perusahaan

Pada tanggal 16 November 2021, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), yang dikenal sebagai BGR Logistik, resmi melebur ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021.

Proses penggabungan tersebut kemudian diformalkan melalui penandatanganan Akta Notaris pada 2 Desember 2021 di Kementerian BUMN Republik Indonesia. Dalam rangka mengelola lini bisnis logistik, anak perusahaan PPI yaitu PT PT TSV berganti nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia, sebagai hasil integrasi layanan logistik antara eks BGR Logistik dan PT TSV.

Pada 13 Desember 2021, dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menetapkan struktur baru Dewan Komisaris dan Direksi PT BGR Logistik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

1. Eddi Santosa sebagai Komisaris Utama.

2. Mochamad Aswin sebagai Komisaris Independen
3. Andry Tanudjaja sebagai Komisaris
4. Budi Susanto sebagai Direktur Utama
5. Energy sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Business Support
6. Syailendra sebagai Direktur Komersial dan Operasi

Awalnya, fokus utama perusahaan adalah menyediakan, menyewakan, dan mengelola fasilitas pergudangan, baik yang tertutup maupun terbuka, serta menyediakan layanan distribusi. Seiring waktu, PT BGR Logistik Indonesia bertransformasi menjadi perusahaan logistik berbasis digital dengan mengadopsi teknologi informasi dalam seluruh proses bisnisnya, termasuk implementasi sistem ERP SAP S/4 HANA untuk meningkatkan efisiensi kerja.

Kini, PT BGR Logistik Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai "*Your Smart Logistics Partner*", penyedia layanan logistik terintegrasi yang andal dan terpercaya. Perusahaan ini memiliki cakupan operasional di 20 wilayah kerja di seluruh Indonesia, mengelola lebih dari 500 gudang dan 1.500 armada, serta memiliki 45 jaringan internasional di wilayah Eropa, Amerika Serikat, China, dan Asia. Dengan pengalaman selama 44 tahun dan kontribusinya yang positif terhadap para pemangku kepentingan, PT BGR Logistik Indonesia telah membuktikan diri sebagai salah satu perusahaan logistik terpercaya di Indonesia. Berikut merupakan perjalanan PT BGR Logistik Indonesia (BLI):

- 1) Departemen Perdagangan
- 2) *Warehousing* (1977)

Lahir sebagai *stockholder* pupuk milik PUSRI, PKG, PKT, dan PIM.

- 3) *Freight Forwarding* (1985)

Intensifikasi bisnis dalam distribusi, pengantongan pupuk dan jasa lainnya.

4) *Integrated Logistics* (2005)

Memberikan jasa logistik terintegrasi mulai proses pengurusan ekspor dan impor, CMS, RMC, depo, pergudangan hingga distribusi.

5) *Digital Logistics Company* (2019)

Memperkuat kegiatan logistik yang terintegrasi dan diferensiasi.

6) *Beyond Digital Logistics Company* (2020)

Menerapkan sistem IT pada semua bisnis yang dijalani mulai merambah ke *e-commerce* dengan mengembangkan BGR *Access* sebagai *platform* IT.

7) *Your Smart Logistics Partner* (2021)

Merger dengan PT PPI dan berubah nama menjadi PT BGR Logistik Indonesia.

4.1.3 Visi dan Misi PT BGR Logistik Indonesia

Visi dan misi dari PT BGR Logistik Indonesia adalah:

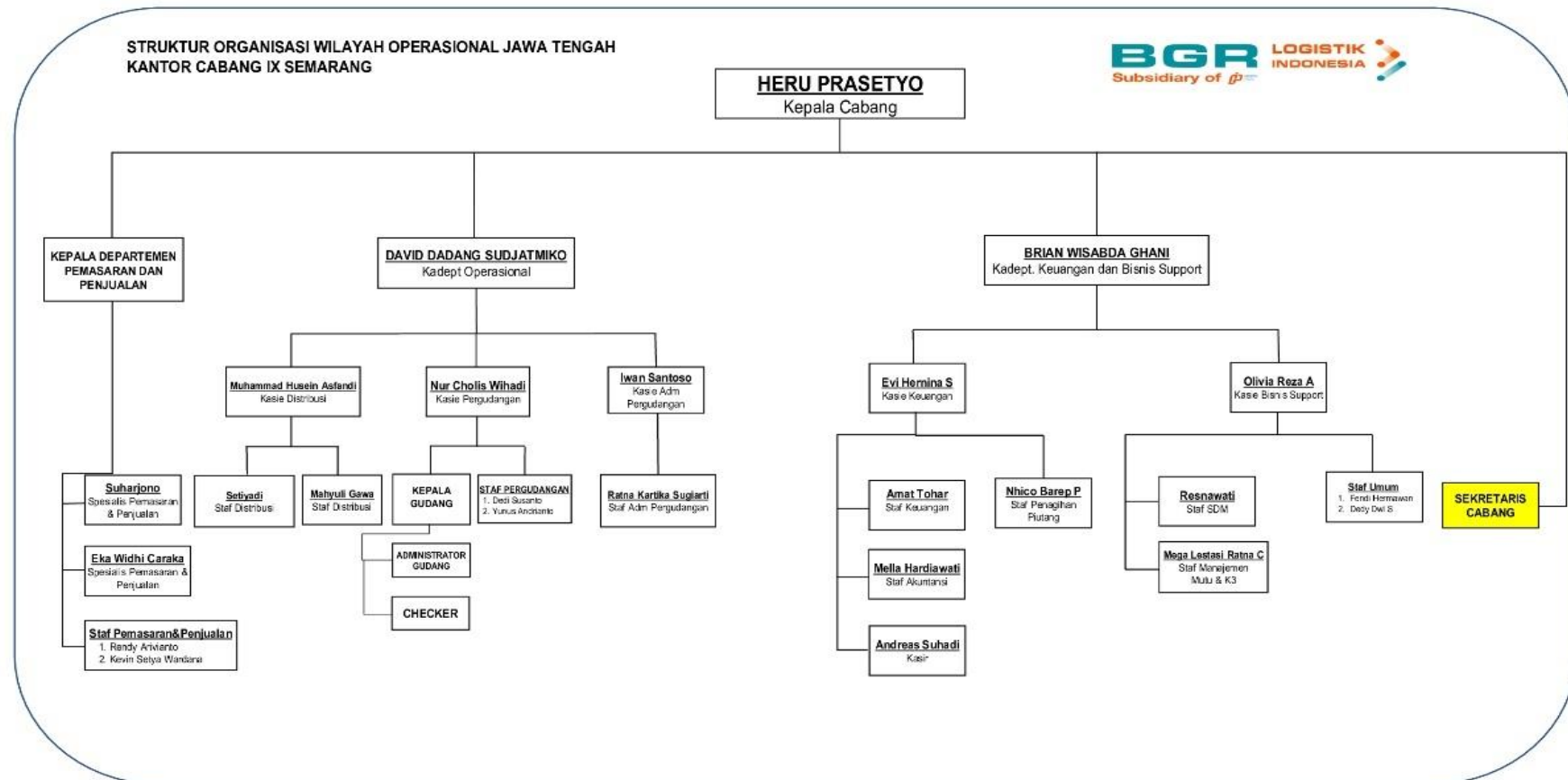
a. Visi

Menjadi perusahaan jasa logistik berbasis digital yang memiliki jaringan luas dengan solusi terintegrasi, kompetitif, andal dan terpercaya.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan di jasa logistik secara luas.
- 2) Mendukung bisnis BUMN klaster pangan sebagai penyedia kegiatan logistik terpadu.
- 3) Berkolaborasi dengan penyedia jasa logistik baik nasional maupun internasional.
- 4) Mengembangkan infrastruktur, teknologi dan SDM yang inovatif.

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT BGR Logistik Divre IX Semarang

Sumber: PT BGR Logistik Divre IX Semarang (Data Sekunder)

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Saat Ini di PT BGR Logistik

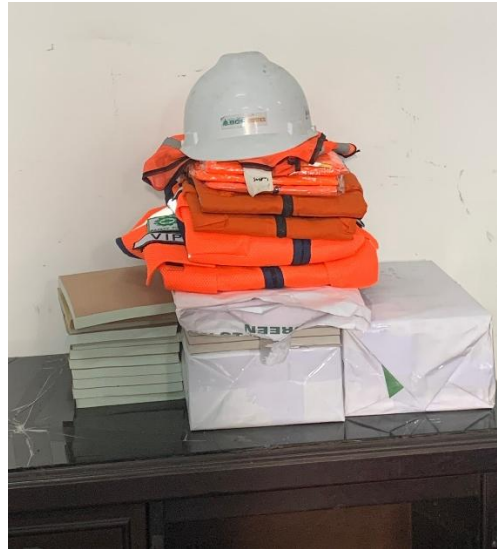
Indonesia Divisi Regional IX Semarang

1. Fasilitas Penunjang K3
 - a. Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Indikator keberhasilan program K3 salah satunya terdapat unsur keselamatan dengan penyediaan alat pelindung diri dalam mendukung penerapan praktik keselamatan dan kesehatan kerja. APD merupakan alat pelindung diri memiliki tujuan dalam melindungi diri dari potensi bahaya yang dapat terjadi. Bentuk tanggung jawab perusahaan juga dapat berupa penyediaan APD yang memadai dan sesuai, melakukan pelatihan kepada pekerja dalam hal menggunakan dan cara merawat APD dengan baik, serta melakukan peninjauan secara berkala dan memperbaharui APD yang ada.

Sesuai pasal 14 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1970 mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja yang mewajibkan organisasi atau perusahaan untuk menyediakan alat pelindung diri (APD) secara cuma-cuma kepada tenaga kerja dan *visitor* yang berada dalam lingkungan atau area kerja. PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang telah menyediakan APD di lingkungan kerja sebagai upaya untuk meminimalisir suatu risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Q-3 sebagai kepala departemen operasional mengatakan:

“Untuk saat ini sesuai kondisi pekerjaan sudah menyediakan APD. Cuma ada beberapa perlu tambahan pemenuhan untuk tamu, kalau untuk pekerjanya sudah.” (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)



Gambar 4.3 Ketersediaan APD di PT BLI Divre Semarang

Sumber: Dokumentasi Penulis (Observasi Selasa, 12 November 2024)

Observasi yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang sudah menyediakan dan memiliki perlengkapan alat pelindung diri (APD) pada lingkungan kerja. Namun, alat pelindung diri (APD) yang tersedia saat ini kurang memadai dan juga penyimpanannya dengan cara yang kurang tepat. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi dari penulis membuktikan bahwa APD hanya ditumpuk saja serta jumlahnya terbatas. Alat pelindung diri (APD) minimal yang wajib disediakan oleh perusahaan berupa *safety helmet* yang tentunya memiliki fungsi sebagai perlindungan kepala terhadap benda keras, benturan, pukulan, dan arus listrik *safety vest* wajib digunakan untuk menghindari dari bahaya yang diakibatkan dari bahan kimia, percikan dari cairan panas, bahan yang memiliki potensi menyebabkan infeksi, dan *safety shoes* sebagai alat perlindungan pada kaki dari bahaya seperti percikan cairan, kejatuhan dari benda yang berat, dan tusukan oleh benda tajam.

Tabel 4.1 Matrix Alat Pelindung Diri (APD)

Jenis APD	Cara Pemakaian	Manfaat	Keterangan Lain	Tata Cara Perawatan
<i>Safety Helmet</i>	Dipakai di kepala, disesuaikan dengan ukuran kepala, tali dagu dikaitkan agar tidak lepas.	Melindungi kepala dari benturan, jatuhnya benda keras.	Digunakan di area kerja dengan risiko benda jatuh.	Bersihkan secara berkala, periksa retak atau kerusakan, ganti jika aus.
<i>Safety Vest</i>	Dipakai di luar pakaian kerja, dikancingkan atau direkatkan, pastikan tidak longgar.	Meningkatkan visibilitas pekerja, mencegah tertabrak kendaraan atau alat berat.	Rompi warna cerah dengan strip reflektif.	Dicuci secara rutin, jangan disetrika strip reflektif, simpan di tempat kering.
<i>Safety Shoes</i>	Dipakai di kaki, tali sepatu diikat dengan kuat, gunakan ukuran yang sesuai.	Melindungi kaki dari benda tajam, benda berat jatuh, cairan kimia, atau percikan panas.	Sol anti slip, pelindung jari kaki baja.	Bersihkan debu dan kotoran, keringkan jika basah, periksa sol dan pelindung baja.

Sumber: Hasil Penelitian yang Diolah Penulis, 2025

b. Ketersediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

APAR merupakan alat pemadam kebakaran yang bersifat portabel dan dirancang agar dapat digunakan dengan cepat dan praktis oleh siapa saja ketika terjadi kebakaran skala kecil. Tujuannya adalah untuk menghentikan

penyebaran api sejak dini, sehingga potensi kerugian terhadap jiwa maupun harta benda dapat diminimalkan.

PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang telah menyediakan APAR yang diinformasikan oleh informan Q-2 selaku kasie *business support* mengatakan:

“Sudah. Ada rompi, jaket, helm, sepatu, APAR.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan informan, terbukti bahwa PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang telah menyediakan APAR pada salah satu gudang pupuk. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dokumentasi oleh penulis.



Gambar 4.4 Ketersediaan APAR di Gudang Pupuk

Sumber: Dokumentasi Penulis (Observasi Rabu, 20 November 2024)

Berdasarkan hasil dokumentasi oleh penulis, pemasangan APAR tersebut belum sesuai dengan syarat lokasi pemasangan APAR yang baik. Beberapa syarat lokasi untuk pemasangan APAR, yaitu pemasangan pada

tempat yang mudah untuk dijangkau, tidak terhalang oleh benda apapun, dan terlihat jelas oleh semua orang.

2. Pelatihan dan Sosialisasi K3

Pelatihan K3 merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk membekali pekerja dan pihak terkait dengan pemahaman serta keterampilan agar bisa bekerja dengan aman dan sehat. Melalui pelatihan ini, pekerja akan belajar mengenali potensi bahaya di tempat kerja, memahami cara pencegahan kecelakaan, serta tahu langkah apa yang harus diambil jika terjadi situasi darurat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang belum melakukan pelatihan K3 secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan penyampaian oleh informan Q-3 mengatakan bahwa:

“Terkait pelatihan saat ini mungkin masih belum ada, cuma sudah kita ajukan dari operasional. Hanya saja untuk sosialisasi terkait K3 sudah kita jalankan lewat *zoom meeting*”. (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)

Hasil dari wawancara bahwa pelatihan secara berkelanjutan belum dijalankan oleh perusahaan. Akan tetapi perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang diperkuat dengan wawancara dengan informan Q-2 yaitu:

“Kita sih pakai *zoom* sama ada himbauan gitu, poster-poster sudah kita kirim ya tentang 5R, APD, K3, dan juga yang lain seperti manajemen mutu yang berhubungan K3. Kita sosialisasinya masih via *zoom* atau kalau pas lagi SO (*stock opname*) itu juga sekalian.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)



Gambar 4.5 Sosialisasi Pelatihan 5R via *Zoom Meeting*

Sumber: Data Sekunder, 2024

Namun, sosialisasi yang dilakukan kurang efektif dikarenakan lebih sering dilakukan dengan *zoom meeting* dibandingkan sosialisasi secara langsung di lapangan. Selain sosialisasi dengan menggunakan *zoom meeting*, PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang juga memasang poster untuk mendukung sosialisasi mengenai K3.



Gambar 4.6 Pemasangan Poster 5R

Sumber: Dokumentasi Penulis (Observasi Rabu, 20 November 2024)

3. Kebijakan K3

Kebijakan K3 adalah aturan dan panduan yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan semua orang di tempat kerja baik karyawan maupun tamu bisa bekerja dengan aman dan sehat. Kebijakan ini biasanya berisi komitmen dari manajemen untuk menjaga keselamatan kerja, sedangkan prosedurnya menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti agar potensi bahaya bisa dicegah dan risiko kerja bisa dikurangi.

Pada dasarnya kebijakan K3 adalah seperti janji atau komitmen perusahaan terhadap keselamatan, dan prosedurnya adalah petunjuk teknis yang mengatur bagaimana cara bekerja agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang memiliki kebijakan terkait K3. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh informan Q-1 selaku *staff* manajemen mutu dan K3 yang mengatakan:

“Langkahnya sendiri pertama dari kebijakan. Kebijakan dari PT BGR Logistik sendiri ada kebijakan terpusat untuk seluruh cabang terkait K3 dan mutu. K3 sama mutu itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ini kita ada kebijakan dari 2023 terakhir dari pusat tentang komitmen manajemen PT BGR Logistik, kebijakan mutu, kebijakan K3, SKD untuk penetapan SMK3, dan pedoman SMK3. Dari kebijakan itu turunannya implementasi dengan program di setiap cabang sampai *monitoring*.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Sosialisasi kebijakan K3 masuk kedalam indikator penerapan K3 yang tentunya bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan. Hasil yang didapatkan dari pernyataan informan di atas bahwa PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang telah memiliki kebijakan dan melakukan sosialisasi pada tenaga kerja sebagai bentuk kepatuhan terhadap penerapan K3.

4. Keterlibatan Pekerja

Keterlibatan pekerja dalam K3 merujuk pada keterlibatan aktif para pekerja dalam mengenali potensi bahaya, melaporkan risiko, serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan keselamatan di lingkungan kerja yang termasuk dalam indikator keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keterlibatan ini sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat, serta untuk meningkatkan kesadaran mengenai keselamatan di kalangan seluruh karyawan.

Pekerja terutama buruh pada PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang memiliki kesadaran yang kurang terhadap K3. Hal ini terbukti dengan pernyataan dari informan Q-2 yang mengatakan:

“Pertama menurut saya sih kesadaran. Kalau untuk *checker* dan admin itu kebanyakan sadar. Cuma untuk buruh masih belum ada kesadaran jadi masih menyepelekan. Padahal nanti kalau misal terjadi kecelakaan yang rugi juga buruhnya. Karena pernah nih ada buruh di Gudang Bantul itu gak pakai APD karena emang tidak mau. Terus kena belakang pintu *truck* kepalanya dan gak pakai helm jadinya bocor kepalanya sampai harus dijahit. Jadi kesadaran dari individu itu penting.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Padahal keterlibatan pekerja sangat dibutuhkan dalam membangun program keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja maka tidak hanya merugikan para pekerja saja, melainkan perusahaan juga mengalami kerugian. Dengan adanya keterlibatan pekerja yang optimal, perusahaan dapat dengan mudah membangun budaya komunikasi dua arah, sehingga pelaksanaan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan semata, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen bersama seluruh pihak di tempat kerja

Terdapat pendukung dengan adanya dokumentasi mengenai buruh yang tidak mengenakan APD.



Gambar 4.7 Buruh Melakukan Pemuatan Pupuk Tanpa APD

Sumber: Dokumentasi Penulis (Kamis, 21 November 2024)

5. Pelaksanaan Inspeksi K3 Secara Berkala

Inspeksi di lingkungan kerja adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai dan memeriksa kondisi serta praktik keselamatan di tempat kerja. Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk menemukan potensi bahaya, memastikan bahwa semua peraturan K3 dipatuhi, serta mengevaluasi seberapa efektif langkah-langkah yang telah diambil untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan.

PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan dibantunya melakukan inspeksi pada lingkungan kerja yang merupakan salah satu

indikator yang masuk dalam penerapan K3. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan Q-1 memberikan pernyataan:

“Ya inspeksi ada seperti inspeksi gudang dan inspeksi armada. Kalau inspeksi armada kita ada jadwalnya tapi tidak bisa menyesuaikan karena kita harus nunggu kondisi supir *free* dan supir tidak selalu di Semarang, jadi dijalankan tapi lihat kondisi dari supir. Kalau inspeksi gudang kadang sebulan sekali muter gudang.” (Wawancara Jumat 29 November 2024)

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara dengan informan Q-3 yang menyatakan bahwa:

“Kalau inspeksi secara rutin mungkin belum. Hanya kita saat tim operasional melakukan kunjungan itu hanya mengingatkan. Jadi belum pasti sebulan sekali, tapi kita dari operasional minta koordinasi sama *business support* untuk dapat dilakukan inspeksi secara rutin.” (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)

Berdasarkan pernyataan dari informan Q-1 dan Q-3, PT BGR Logistik Divisi Regional IX Semarang belum melakukan inspeksi secara berkala atau rutin yang artinya belum memenuhi indikator dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

4.2.2 Kendala yang Menghambat dalam Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang

Kendala merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan atau organisasi. PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang memiliki kendala yang dialami. Beberapa kendala tersebut yaitu:

1. Tidak Adanya Anggaran Khusus K3

Tanpa adanya alokasi dana yang cukup, berbagai kebutuhan penting seperti pelatihan karyawan, pembelian alat pelindung diri, penyediaan sarana keselamatan, hingga kegiatan edukasi dan sosialisasi tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Hal ini membuat upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat menjadi terhambat, bahkan bisa saja diabaikan sepenuhnya.

PT BGR Logistik Divisi Regional IX Semarang belum secara maksimal dalam penyediaan APD maupun APAR dikarenakan membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan Q-1 selaku *staff* manajemen mutu dan K3 yaitu:

“Kadang kayak APAR ada yang sampai telat atau kadaluwarsa karena kan sebenarnya biaya sudah di *plot* seperti biaya umum, biaya operasional, biaya *handling*. Nah, kalau APAR atau APD itu membutuhkan biaya tambahan, sedangkan biaya utama saja kadang kita kurang. Karena memang kondisi perusahaan lagi begini jadinya ya diutamakan yang pokok dulu.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Padahal fasilitas penunjang K3 seperti APD dan APAR sangat penting untuk disediakan oleh perusahaan secara maksimal. Berdasarkan pernyataan oleh informan Q-2 selaku kasie *business support* yang mengatakan:

“Yang pasti APD itu harus ada ya. Seperti kemarin itu di gudang sudah ada sepatu, helm, jaket itu wajib juga permintaan dari *vendor* sekarang harus dipenuhi. Karena kemari ada *case* di Gudang Pemalang ada ularnya, jadi memang APD itu penting sama kelengkapan yang lain.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Walaupun pada dasarnya ketersediaan APD dan APAR sangat penting, namun perusahaan belum secara maksimal menyediakan fasilitas penunjang K3 tersebut yang dibuktikan oleh pernyataan oleh kedua informan di atas. Kendala dalam penerapan K3 oleh PT BGR Logistik Divisi Regional IX Semarang ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus untuk menunjang keberhasilan penerapan K3.

2. Kurangnya Kepedulian Pekerja Terhadap K3

Jika pekerja tidak menyadari pentingnya menjaga keselamatan kerja atau merasa itu bukan bagian dari tanggung jawab mereka, maka kemungkinan besar

mereka akan mengabaikan aturan keselamatan, tidak menggunakan alat pelindung diri sebagaimana mestinya, dan kurang waspada terhadap potensi bahaya di sekitarnya. Pada dasarnya, setiap tenaga kerja atau karyawan memiliki kewajiban dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada lingkungan kerja. Peraturan yang dimaksud salah satunya adalah peraturan mengenai kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pada UU No. 1 Tahun 1970 menyatakan bahwa salah satu tujuan utama dari penerapan K3 adalah melakukan perlindungan dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain yang ada di lingkungan kerja

Pada kenyataannya, pekerja pada PT BGR Logistik Divisi Regional IX Semarang masih kurang peduli dan menyepelekan terhadap penerapan K3 yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan Q-3 selaku kepala departemen operasional yaitu:

“Kalau penerapan K3 mungkin tergantung *personal* ya. Bisa jadi *personal* ini mengabaikan dengan istilahnya sepele lah tentang hal K3. Cuma hal seperti itu sudah kita ingatkan untuk pemakaian APD minimal supaya diketahui banyak orang kalau disitu ada kegiatan.” (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)

Kurangnya kepedulian pekerja tersebut diperkuat dengan pernyataan dari informan Q-1 yaitu sebagai berikut:

“Mereka nggak semua pakai APD. APD paling dipakai kalau ada tamu, kalau gak ada tamu APD dibiarkan sampai berdebu dan rusak.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Kurangnya kepedulian pekerja ini termasuk kendala yang menghambat dalam penerapan K3 pada PT BGR Logistik Divisi Regional IX Semarang. Apabila para pekerja secara terus menerus tidak menaati aturan K3 yang berlaku, maka perusahaan akan sulit mencapai penerapan K3 perusahaan dengan maksimal.

3. Tidak Ada Tim Khusus K3

Dukungan perusahaan dalam penerapan K3 sangat krusial untuk membangun lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam upaya penerapan K3 pada PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang, pengadaan sumber daya manusia sebagai tim khusus K3 untuk bertanggung jawab terhadap seluruh proses dalam penerapan K3 masih kurang maksimal dan kurang efektif.

Hal ini terbukti dari wawancara dengan informan Q-1 yang menyatakan bahwa:

“Tim khusus belum ada, seperti P2K3 gitu belum ada. Saya sendiri ikutnya bagian *business support*. Jadi, sebenarnya K3 tidak bisa berdiri sendiri dan harus ada tim. Nah, tim itu Namanya P2K3 tapi di cabang Semarang belum ada. Setau saya baru ada di kantor pusat DKI Jakarta saja.” (Wawancara Jumat. 29 November 2024)

Pernyataan yang telah dijelaskan oleh informan tersebut dapat diketahui apabila PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang belum terbentuk tim khusus untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan. Pada dasarnya, tim khusus sangat penting untuk perusahaan dalam mendukung penerapan K3 secara maksimal. Namun, dengan tidak dibentuknya tim khusus K3 maka akan menghambat dalam penerapan K3 pada perusahaan.

4. Alat Pelindung Diri (APD) Yang Terbatas

Apabila APD yang tersedia di tempat kerja jumlahnya terbatas atau kualitasnya kurang baik, maka para pekerja tidak mendapatkan perlindungan yang layak secara maksimal saat melakukan tugasnya. Dengan jumlah APD yang terbatas dapat menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan kerja, penurunan

kesadaran keselamatan kerja di kalangan pekerja, dan dapat menyebabkan gagalnya target *zero accident*.

Terbatasnya jumlah APD pada PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang yang dipaparkan oleh informan Q-1 yang mengatakan bahwa:

“Sudah, cuma APD kalau dibilang ada ya ada, tapi kita kan berjalannya bersama *customer*. Jadi *customer* itu punya standar sendiri untuk APD. Misalkan, Gudang BGR cukup dengan 5 APD karena kita tahu lapangannya gimana, mereka nggak semua pakai APD. APD paling dipakai kalau ada tamu, kalau gak ada tamu APD dibiarkan sampai berdebu dan rusak.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Pernyataan yang telah dipaparkan oleh informan Q-1 dapat diketahui bahwa ketersediaan APD bergantung dari *customer*. Dari hasil observasi di lapangan juga terbukti APD yang tersedia lebih sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah pekerja yang berada di lapangan.

5. Kurangnya Pelatihan K3

Jika pekerja tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang keselamatan dan kesehatan kerja, mereka cenderung kurang sadar terhadap risiko yang ada di lingkungan kerja. Mereka juga bisa jadi tidak tahu cara memakai alat pelindung diri dengan benar dan tidak siap saat keadaan sedang darurat.

PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang pernah melakukan pelatihan tentang K3 yang dibuktikan melalui hasil wawancara dengan informan Q-1 yaitu:

“Pelatihan khusus ini ya dari program aku sih itu kemarin ada pelatihan 5R dan APAR. Tapi kalau APAR karena lokasinya tidak memungkinkan jadi nggak bisa diadakan.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Pernyataan di atas didukung oleh informan Q-2 yang mengatakan bahwa:

“Sementara ini masih pakai *zoom* karena terkendala juga sama jarak. Cuma kalau di kantor kita pernah ada pelatihan APAR dan ada rencana juga untuk pelatihan P3K. Kalau pelatihan APAR itu terakhir tahun 2022, soalnya di

kawasan Kota Lama ini tidak boleh mengadakan pelatihan APAR karena akan menimbulkan asap dan api.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan, PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang pernah melakukan pelatihan mengenai K3, namun hal ini terbilang kurang optimal dan tidak dilakukan secara rutin. Hal ini dikarenakan terkendala oleh jarak dan lokasi yang tidak memungkinkan untuk diadakan pelatihan.

4.2.3 Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Upaya Meningkatkan *Safety Culture* pada PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang sudah dijalankan. Berdasarkan indikator budaya keselamatan atau *safety culture* menurut Bilqis et al., (2021) dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterlibatan Aktif Perusahaan Dalam Penerapan Kebijakan K3

Hal ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan pelatihan, menyediakan alat pelindung diri, melakukan pemeriksaan secara berkala, dan memastikan seluruh pekerja mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, manajemen juga menunjukkan komitmennya dengan terus mendorong peningkatan standar K3 serta melibatkan semua karyawan dalam proses pelaksanaannya. Dengan cara ini, terciptalah budaya kerja atau *safety culture* yang lebih aman, tertib, dan sehat di dalam perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan informan Q-2 selaku kasie *business support*, PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang kurang terlibat aktif dalam penerapan kebijakan K3. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Hanya ada *staff* khusus K3 yang masuknya dalam tim *business support*. Karena kelihatannya sekarang K3 itu penting banget ya” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Terdapat pernyataan tambahan yang disampaikan oleh informan yaitu Q-3 untuk memperkuat informasi sebagai berikut:

“Untuk saat ini *staff* K3 memang ikut di departemen *business support* buat keliling. Belum ada tim khusus K3.” (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)

Dari penuturan kedua informan di atas, didapatkan bahwa PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang belum terbentuk tim khusus K3. Hal ini mengakibatkan Perusahaan belum memiliki keterlibatan yang aktif dalam penerapan K3. Namun untuk kedepannya, perusahaan akan meningkatkan sistem K3 yang dibuktikan dengan pernyataan dari informan Q-1 yang mengatakan:

“Bisa sih pembentukan tim kedepannya, terus lebih banyak bertemu dengan kepala gudang, lebih banyak mengadakan *coffee morning* untuk *awareness* K3 bagi karyawan kantor maupun karyawan gudang, mungkin sampai TKBM juga, dan itu tidak mungkin dari K3 sendiri yang menjalankan. Harus ada tim untuk *support* mengurus K3.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Dengan adanya pernyataan tambahan dari informan Q-1, kedepannya PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang akan membentuk tim khusus K3, lebih banyak mengadakan *coffee morning* dan bertemu dengan kepala gudang sebagai upaya dalam penerapan K3 yang lebih maksimal serta meningkatkan budaya keselamatan atau *safety culture* dalam lingkungan kerja.

2. SOP yang Berkaitan Dengan K3

SOP dibuat untuk memberikan kejelasan mengenai apa saja yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dengan benar, serta hal-hal apa yang perlu dihindari agar tidak menimbulkan kecelakaan. Dengan adanya SOP ini, pekerjaan bisa berlangsung secara teratur dan sesuai aturan, sehingga potensi kecelakaan kerja bisa diminimalkan dan lingkungan kerja tetap aman serta sehat.

SOP yang berlaku di PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang saat ini penerapannya ada yang sudah sesuai dengan kondisi lapangan dan ada yang memiliki kendala yang diakibatkan oleh beberapa pekerja yang tidak mematuhi dan menyepelekannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan Q-2 selaku kasie *business support* yang mengatakan sebagai berikut:

“Untuk sementara sudah, cuma kendalanya kalau kita di gudang itu kan sama buruh atau TKBM. Misalnya harus pakai sarung tangan karena kan angkat pupuk tapi kenyataannya kan enggak dipakai. Cuma untuk minimal dari pegawai kita di kantor itu udah melaksanakan SOP. Tapi namanya kecelakaan kerja itu pernah ada dan pasti ada, cuma udah kita minimalisir secara berkala.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Hal ini menunjukkan bahwa SOP belum dipatuhi oleh pekerja secara keseluruhan dan masih terbilang belum secara maksimal. Hal yang sama disampaikan oleh informan Q-3 yang mengatakan:

“Untuk saat ini SOP penegakan K3 di lapangan hanya beberapa yang sudah sesuai dengan penggunaan APD minimal.” (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)

Hasil wawancara dengan kedua informan di atas dapat diketahui apabila komponen pendukung terciptanya *safety culture* dengan adanya SOP belum secara maksimal dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh pekerja atau karyawan di PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang.

3. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif dalam bidang K3 adalah proses penyampaian informasi, instruksi, atau pesan yang berkaitan dengan keselamatan secara jelas dan mudah dipahami oleh semua pekerja, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Cara komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui pengarahan, penggunaan papan informasi, pelatihan, atau diskusi rutin di tempat kerja supaya semua orang aktif terlibat dan memiliki kesadaran tinggi terhadap keselamatan selama bekerja.

Saat ini komunikasi efektif belum dijalankan dengan maksimal oleh PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan Q-2 tentang inspeksi yang dilakukan belum secara menyeluruh di semua gudang:

“Ya paling satu bulan sekali, tapi dari tim pergudangan ketika melakukan *stock opname* atau jumat bersih itu sekaligus ditanyain K3. Cuma kalau dari tim *business support* buat keliling itu belum. Paling ke gudang terdekat aja buat diambil sampel. Karena kalau di gudang yang jauh ya kendalanya biaya dan jarak jadi belum dilakukan inspeksi secara rutin untuk gudang yang jauh.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Jadi, inspeksi belum secara rutin dilakukan terutama di gudang yang lokasinya jauh. Padahal, dengan adanya inspeksi maka komunikasi akan menjadi efektif karena akan langsung melakukan *monitoring* dengan kepala dan pekerja yang ada di gudang apabila terjadi suatu permasalahan K3 akan langsung dilakukan tindak lanjut. Informan Q-1 juga menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Ya karena kita ada kendala jarak juga, misal kalau di kantor itu ada *coffee morning* tapi kalau untuk di gudang ada *zoom meeting* dan ADINDA sebagai aplikasi untuk surat menyurat seluruh cabang PT BLI.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Walaupun diadakan *zoom meeting* untuk melakukan *monitoring* di gudang, hal tersebut dinilai kurang dalam penerapan komunikasi yang efektif dalam upaya meningkatkan *safety culture* dikarenakan tim tidak secara langsung melakukan peninjauan.

Namun untuk kedepannya, PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang berupaya untuk melakukan perbaikan dalam hal komunikasi dengan para pekerja dengan rutin melakukan inspeksi supaya terciptanya penerapan K3 untuk meningkatkan *safety culture* sesuai dengan harapan. Hal ini disampaikan oleh informan Q-3:

“Ya itu kedepannya dilakukan pengawasan atau inspeksi rutin agar karyawan atau petugas yang memang harus menjalankan K3 ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.” (Wawancara Kamis, 05 Desember 2024)

4. Pelatihan Keselamatan Secara Berkelanjutan

Pelatihan keselamatan berkelanjutan (*continuous safety training*) merupakan suatu proses terstruktur dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menjamin bahwa pekerja senantiasa memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang esensial untuk bekerja secara aman dan efektif setiap saat. Pendekatan ini tidak terbatas pada pemberian pelatihan dasar atau insidental, melainkan berfokus pada pembentukan budaya belajar yang berkelanjutan, di mana keselamatan menjadi perhatian utama. Dalam mendukung peningkatan budaya keselamatan atau *safety culture* PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang pernah mengadakan pelatihan keselamatan, namun tidak secara berkelanjutan karena berbagai alasan yang telah disebutkan oleh informan Q-2 sebagai berikut:

“Sementara ini masih pakai *zoom* karena terkendala juga sama jarak. Cuma kalau di kantor kita pernah ada pelatihan APAR dan ada rencana juga untuk pelatihan P3K. Kalau pelatihan APAR itu terakhir tahun 2022, soalnya di kawasan Kota Lama ini tidak boleh mengadakan pelatihan APAR karena akan menimbulkan asap dan api.” (Wawancara Selasa, 03 Desember 2024)

Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara informan Q-1 selaku *staff* manajemen mutu dan K3 yaitu:

“Pelatihan khusus ini ya dari program aku sih itu kemarin ada pelatihan 5R dan APAR. Tapi kalau APAR karena lokasinya tidak memungkinkan jadi nggak bisa diadakan.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Pernyataan dari kedua informan di atas, program pelatihan secara berkelanjutan belum dapat dilaksanakan karena kondisi dari lokasi perusahaan yang tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan pelatihan terutama APAR. Belum adanya pelatihan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa PT BGR Logistik

Indonesia Divisi Regional IX Semarang saat ini belum mencapai komponen dalam mendukung *safety culture* secara maksimal.

Padahal dengan adanya pelatihan keselamatan berkelanjutan akan meningkatkan *safety culture* dan tentunya akan meningkatkan keterampilan para pekerja sehingga mereka juga akan memiliki *awareness* terhadap keselamatan di lingkungan kerja.

5. Partisipasi Aktif Pekerja

Partisipasi aktif pekerja dalam bidang K3 berarti pekerja terlibat secara langsung dan sadar penuh dalam semua hal yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ini tidak hanya sekadar mematuhi aturan yang ada, tetapi juga melibatkan inisiatif untuk melaporkan bahaya yang mungkin muncul, memberikan saran untuk perbaikan prosedur keselamatan, serta berpartisipasi dalam pelatihan dan kegiatan yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.

Partisipasi para pekerja PT BGR Logistik Indonesia Divisi Regional IX Semarang dinilai kurang aktif dalam upaya meningkatkan *safety culture*. Hal ini disampaikan oleh informan Q-1 yang mengatakan:

“Udah sesuai, cuma tinggal penerapannya beda-beda karena tergantung dari pekerjaanya juga patuh SOP atau tidak. Kadang ada supir yang tidak patuh, karena semua tergantung dari karakter masing-masing. SOP emang ada, cuma dijalankan atau tidak tergantung dari pekerjaanya juga.” (Wawancara Jumat, 29 November 2024)

Dari penjelasan oleh informan Q-1, komponen pendukung *safety culture* belum sepenuhnya dipenuhi oleh para pekerja dikarenakan beberapa dari mereka memiliki kesadaran yang kurang terhadap K3 dan itu juga tergantung dari karakter pekerja.

Berdasarkan penerapan K3 yang telah dilakukan melalui fasilitas penunjang K3, pelatihan dan sosialisasi K3, kebijakan K3, keterlibatan pekerja, dan pelaksanaan inspeksi secara berkala sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dapat terbukti bahwa langkah-langkah tersebut menjadi pondasi dalam membentuk komponen pendukung *safety culture* seperti keterlibatan aktif perusahaan dalam penerapan kebijakan K3, SOP yang berkaitan dengan K3, komunikasi yang efektif, pelatihan keselamatan secara berkelanjutan, dan partisipasi aktif pekerja.

4.3 Output Penelitian Terapan

Dengan adanya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya untuk meningkatkan budaya keselamatan atau *safety culture* tentunya akan berdampak terhadap penekanan risiko kecelakaan kerja.

Dalam *output* penelitian terapan, peneliti memberikan rekomendasi SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk dapat mendukung dalam menjalankan kebijakan K3 khususnya terhadap penggunaan APD. Rekomendasi SOP dari peneliti ini diharapkan dapat membantu perusahaan secara efektif dan efisien dalam penerapan K3.

Tabel 4.2 Rekomendasi SOP Untuk Pemakaian APD

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMAKAIAN APD		NO. DOKUMEN : MULAI BERLAKU: REVISI : TGL. REVISI : HALAMAN :
1. TUJUAN Untuk menjamin penggunaan APD yang benar dan konsisten untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 2. RUANG LINGKUP Berlaku bagi seluruh karyawan, buruh, dan pihak ketiga yang melakukan kegiatan di area PT BGR Logistik Indonesia Divre IX Semarang 3. TANGGUNG JAWAB a) Petugas K3: Melakukan sosialisasi, inspeksi rutin, dan evaluasi b) Seluruh karyawan: Mematuhi SOP dan menggunakan APD sesuai ketentuan 4. SANKSI PELANGGARAN a) Tidak memakai APD: Teguran lisan → tertulis → skors ringan b) Melanggar SOP kerja aman: Teguran dan evaluasi kerja oleh atasan c) Menyebabkan insiden: Sanksi tegas sesuai kebijakan perusahaan 5. PROSEDUR PELAKSANAAN a) <i>Briefing</i> pagi yang dilakukan sebelum mulai bekerja, dipimpin oleh supervisor untuk menyampaikan risiko kerja dan pengingat keselamatan b) Pekerja wajib menggunakan APD seperti helm, rompi, sepatu <i>safety</i>, masker, dan sarung tangan sesuai tugasnya c) Laksanakan tugas sesuai SOP dan prosedur kerja aman yang telah disosialisasikan d) Petugas K3 dan <i>supervisor</i> melakukan inspeksi selama kegiatan berlangsung untuk memastikan kepatuhan e) Pekerja wajib segera melaporkan jika melihat potensi bahaya atau mengalami insiden kepada petugas K3 untuk dilakukan pencatatan		

Sumber: Data Diolah, 2025